



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 62 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18./M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2237/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- b. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
- e. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- f. penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
- g. penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h. pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i. penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- j. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 4

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Kelas, terdiri atas:

- a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
- b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II; dan
- c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

Pasal 5

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
- c. Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban; dan
- d. Seksi Kesyahbandaran.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

- (3) Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.
- (4) Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 7

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II

Pasal 8

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II, terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
- c. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban; dan
- d. Petugas Kesyahbandaran.

Pasal 9

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

- (3) Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.
- (4) Petugas Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 10

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

Pasal 11

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III, terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
- c. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban; dan
- d. Petugas Kesyahbandaran.

Pasal 12

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

- (3) Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.
- (4) Petugas Kesyahbandaran mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan

Pasal 13

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang membawahnya.
- (3) Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertindak selaku Syahbandar sebagai penyelenggara fungsi koordinasi tertinggi di pelabuhan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan petugas serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

ESELON

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I adalah jabatan Eselon III.b;
- (2) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II adalah jabatan Eselon IV.a;

- (3) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III adalah jabatan Eselon IV.b.

BAB VII

L O K A S I

Pasal 26

- (1) Sejak berlakunya peraturan Menteri ini jumlah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan Non Komersial sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) yang terdiri dari:
- a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebanyak 5 (lima) lokasi;
 - b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebanyak 20 (dua puluh) lokasi; dan
 - c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebanyak 161 (seratus enam puluh satu).
- (2) Lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pengisian Sumber Daya Manusia pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 28

Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Para Gubernur Provinsi;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.

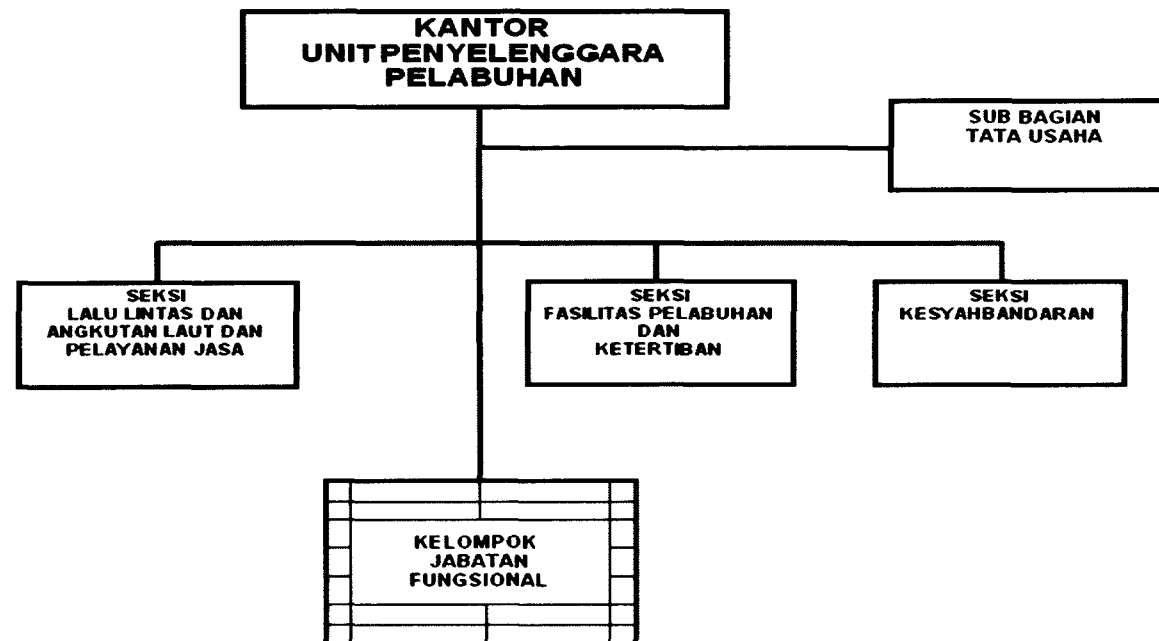
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 62 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 November 2010

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I
(ESELON III.b)**



MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

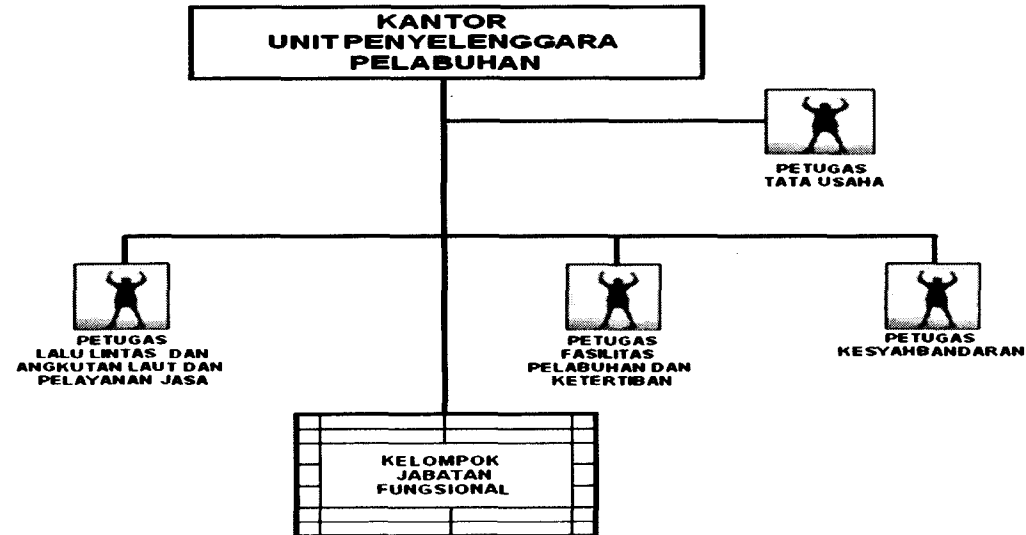
FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 62 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 November 2010

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II
(ESELON IV.a)**



MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

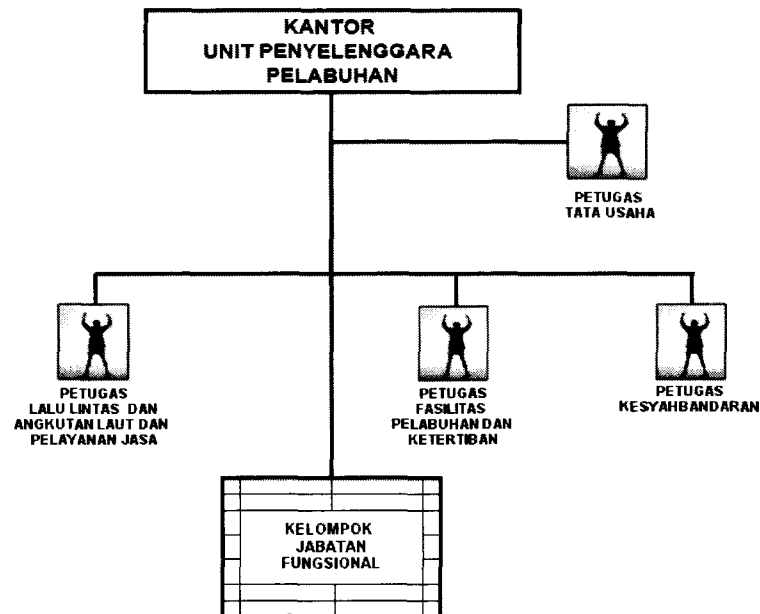
UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 62 TAHUN 2010

TANGGAL : 5 November 2010

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III
(ESELON IV.b)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR KRIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 62 TAHUN 2010
TANGGAL: 5 November 2010

**DAFTAR LOKASI, NAMA PELABUHAN DAN WILAYAH KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN**

**I. KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I
(ESELON III.b)
(Jumlah 5 lokasi)**

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
1.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
2.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Manggar	Bangka	Bangka Belitung
3.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Laut	Kutai	Kalimantan Timur
4.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Lhok Tuan	Kutai	Kalimantan Timur
5.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bau-bau - Wilayah Kerja Banabungi - Wilayah Kerja Boipinang - Wilayah Kerja Dongkala - Wilayah Kerja Kasipute - Wilayah Kerja Maligano - Wilayah Kerja Labuhan Belanda - Wilayah Kerja Papaliya - Wilayah Kerja Sekeli - Wilayah Kerja Waha/Usuka - Wilayah Kerja Wanci - Wilayah Kerja Lasalimu - Wilayah Kerja Kalidupa	Bau-bau	Sulawesi Tenggara

**II. KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II
(ESELON IV.a)
(Jumlah 20 lokasi)**

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
1.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep - Wilayah Kerja Daik Lingga - Wilayah Kerja Panuba (Panuba) - Wilayah Kerja Sei Buluh	Dabo Singkep	Kepulauan Riau
2.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Batu	Tanjung Batu	Kepulauan Riau
3.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nipah Panjang - Wilayah Kerja Sei Likan - Wilayah Kerja Lembur Luar - Wilayah Kerja Pemusiran - Wilayah Kerja Simbur Naik - Wilayah Kerja Air Hitam Laut	Tanjung Jabung Timur	Jambi
4.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pekalongan - Wilayah Kerja Wirades - Wilayah Kerja Pemasang	Pekalongan	Jawa Tengah
5.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanah Grogot - Wilayah Kerja Teluk Adang	Pasir	Kalimantan Timur
6.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Santan	Kutai	Kalimantan Timur
7.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sangatta	Kutai Timur	Kalimantan Timur

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
8.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tahuna - Wilayah Kerja Kawaluso - Wilayah Kerja Lapango	Sangihe Talaud	Sulawesi Utara
9.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Poso	Poso	Sulawesi Tengah
10.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Palopo	Luwu	Sulawesi Selatan
11.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomala - Wilayah Kerja Dawi-Dawi - Wilayah Kerja Tangketada - Wilayah Kerja Toari	Kolaka	Sulawesi Tenggara
12.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Namlea	Maluku Tengah	Maluku
13.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu - Wilayah Kerja Hitu - Wilayah Kerja Saparua/Haria	Maluku Tengah	Maluku
14.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tual - Wilayah Kerja Wlat (Elat) - Wilayah Kerja Koor	Maluku Tenggara	Maluku
15.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki - Wilayah Kerja Lerokis - Wilayah Kerja Mangole - Wilayah Kerja Adaut	Maluku Tenggara	Maluku

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Dawera - Wilayah Kerja Tega 		
16.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tobelo <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Galela - Wilayah Kerja Wasilei - Wilayah Kerja Kao - Wilayah Kerja Dama - Wilayah Kerja Darume - Wilayah Kerja Sopus - Wilayah Kerja Pulau Tagalaya - Wilayah Kerja Kupa-kupa 	Halmahera Halmahera Halmahera Halmahera Doi Halmahera Halmahera Tagalaya Halmahera	Maluku Utara
17.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sanana <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Malbuha - Wilayah Kerja Poheha - Wilayah Kerja Kabau - Wilayah Kerja Fuata - Wilayah Kerja Baruakol - Wilayah Kerja Waitina 	Sula Besi Sula Besi Sula Besi Sula Besi Sula Besi Mangole Mangole	Maluku Utara
18.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Amamapare	Mimika	Papua Barat
19.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dobo	Maluku Tenggara	Maluku
20.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuha/Babang <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Labuha - Wilayah Kerja Loleo Jaya - Wilayah Kerja Indari - Wilayah Kerja Wayauwa - Wilayah Kerja Pigaraja - Wilayah Kerja Belang-belang - Wilayah Kerja Yoba - Wilayah Kerja Pelita 	Bacan Bacan Bacan Bacan Bacan Bacan Bacan Bacan Mandioli Muari	Maluku Utara

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	- Wilayah Kerja Busua		

**III. KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III
(ESELON IV.b)
(Jumlah 161 lokasi)**

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
1.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Idi - Wilayah Kerja Kuala Beukah	Aceh Timur	Nanggroe Aceh Darussalam
2.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tapak Tuan	Aceh Selatan	Nanggroe Aceh Darussalam
3.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Singkil - Wilayah Kerja P. Banyak - Wilayah Kerja Gosong Telaga - Wilayah Kerja P. Serok	Singkil	Nanggroe Aceh Darussalam
4.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinabang	Aceh Barat	Nanggroe Aceh Darussalam
5.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang	Aceh Barat	Nanggroe Aceh Darussalam
6.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Susoh	Aceh Selatan	Nanggroe Aceh Darussalam
7.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Teluk Dalam -Wilayah Kerja Lagundri -Wilayah Kerja Solonake	Nias	Sumatera Utara

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
8.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sirombu - Wilayah Kerja Hinako - Wilayah Kerja Lahusa - Wilayah Kerja Muale	Nias	Sumatera Utara
9.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Lahewa - Wilayah Kerja Lelhewau - Wilayah Kerja Tuhembarua	Nias	Sumatera Utara
10.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pulau Tello - Wilayah Kerja Pulau Tanah Masa - Wilayah Kerja Sogolo-golo - Wilayah Kerja Labuhan Hiu	Nias	Sumatera Utara
11.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pantai Cermin - Wilayah Kerja Pantai Labuh - Wilayah Kerja Percut - Wilayah Kerja Rantau Panjang	Deli Serdang	Sumatera Utara
12.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Beringin - Wilayah Kerja Sialang Buah	Asahan	Sumatera Utara
13.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pangkalan Dodek	Dodek	Sumatera Utara
14.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Tiram - Wilayah Kerja Parupuk	Asahan	Sumatera Utara
15.	Kantor Unit Penyelenggara	Labuhan Batu	Sumatera Utara

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	Pelabuhan Leidong - Wilayah Kerja Simangdulang		
16.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Sarang Elang - Wilayah Kerja Labuhan Bilik	Labuhan Batu	Sumatera Utara
17.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sikara-Kara/Natal - Wilayah Kerja Tabuyung - Wilayah Kerja Singkuang	Meddina	Sumatera Utara
18.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sei Berombong - Wilayah Kerja Ajamu - Wilayah Kerja Gaja Mati - Wilayah Kerja Sei Kubang - Wilayah Kerja Pantai Pukat	Labuhan Batu	Sumatera Utara
19.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Barus - Wilayah Kerja Manduamas - Wilayah Kerja Muara Tapus	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara
20.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Pura - Wilayah Kerja Tapak Kuda - Wilayah Kerja Kuala Serupa (Serapu)	Langkat	Sumatera Utara
21.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pulau Kampai	Deli Serdang	Sumatera Utara
22.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa - Wilayah Kerja Pasir Panjang	Pasir Panjang	Kepulauan Riau

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
23.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Senayang	Senayang	Kepulauan Riau
24.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Gaung - Wilayah Kerja Kuala Mandah - Wilayah Kerja Kuala Raya - Wilayah Kerja Pulau Kijang - Wilayah Kerja Sapat	Indragiri Hilir	Riau
25.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinaboi	Bengkalis	Riau
26.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Medang	Bengkalis	Riau
27.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan	Bengkalis	Riau
28.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batu Panjang	Bengkalis	Riau
29.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Gantung (Guntung)	Indragiri Hilir	Riau
30.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Siuban - Wilayah Kerja Tua Pejat	Mentawai	Sumatera Barat
31.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Muara Siberut - Wilayah Kerja Muara Sikabalan	Mentawai	Sumatera Barat

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
32.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sikakap - Wilayah Kerja Bakai	Mentawai	Sumatera Barat
33.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Mendahara	Tanjung Jabung Timur	Jambi
34.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Malakoni-Enggano	Bengkulu Selatan	Bengkulu
35.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Linau/Bintuhan - Wilayah Kerja Muko-Muko	Bengkulu Selatan	Bengkulu
36.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Lumpur	Ogan Komering Hilir	Sumatera Selatan
37.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Toboali	Bangka	Bangka Belitung
38.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Menggala - Wilayah Kerja S.Burung - Wilayah Kerja Teladas	Teluk Bawang	Lampung
39.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung - Wilayah Kerja Krui	Lampung Selatan	Lampung
40.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai - Wilayah Kerja Way Seputih	Lampung Tengah	Lampung

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
41.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Mesuji	Lampung Utara	Lampung
42.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Teluk Betung - Wilayah Kerja Kalianda	Bandar Lampung	Lampung
43.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Ratu	Sukabumi	Jawa Barat
44.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pangandaran	Indramayu	Jawa Barat
45.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pamanukan	Pamanukan	Jawa Barat
46.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Indramayu - Wilayah Kerja Balongan - Wilayah Kerja Kejawan	Indramayu	Jawa Barat
47.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Anyer Lor	Serang	Banten
48.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan - Wilayah Kerja Muara Binu	Pandeglang	Banten
49.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Karangantu - Wilayah Kerja Kresek/Kronjo	Serang	Banten
50.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bojanegara	Serang	Banten

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
51.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Brebes	Brebes	Jawa Tengah
52.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara	Jepara	Jawa Tengah
53.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Karimun Jawa	Jepara	Jawa Tengah
54.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Juwana	Pati	Jawa Tengah
55.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang - Wilayah Kerja Lasem	Rembang	Jawa Tengah
56.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang	Batang	Jawa Tengah
57.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bawean - Wilayah Kerja Tambak - Wilayah Kerja Camar	Gresik	Jawa Timur
58.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Telaga Biru - Wilayah Kerja Sepulu - Wilayah Kerja Poleng	Bangkalan	Jawa Timur
59.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Branta - Wilayah Kerja Sampang - Wilayah Kerja Kamal - Wilayah Kerja Nipa - Wilayah Kerja Pasion	Pamekasan	Jawa Timur

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
60.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sapudi - Wilayah Kerja Gayam - Wilayah Kerja P. Raas	Sumenep	Jawa Timur
61.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sapekan - Wilayah Kerja Kangean - Wilayah Kerja Pagerungan - Wilayah Kerja Pabean	Sumenep	Jawa Timur
62.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kalbut - Wilayah Kerja Paiton - Wilayah Kerja Besuki - Wilayah Kerja Jangkar - Wilayah Kerja Grati - Wilayah Kerja Lekok - Wilayah Kerja Kalibuntu - Wilayah Kerja Pasir Putih - Wilayah Kerja Meimbo	Besuki	Jawa Timur
63.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Masalembo	Sumenep	Jawa Timur
64.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Brondong - Wilayah Kerja Tg. Awar-Awar/Tuban - Wilayah Kerja Jenuh - Wilayah Kerja Karang Agung	Sumenep	Jawa Timur
65.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Ketapang - Wilayah Kerja Blimbing Sari - Wilayah Kerja Muncar - Wilayah Kerja Pancer - Wilayah Kerja Granjangan	Sumenep	Jawa Timur

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
66.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida - Wilayah Kerja Nusa Lembongan - Wilayah Kerja Kusamba - Wilayah Kerja Sanur	Kelungkung	Bali
67.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Gilimanuk - Wilayah Kerja Labuhan Lalang	Buleleng	Bali
68.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Buleleng - Wilayah Kerja Sangsit	Buleleng	Bali
69.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok - Wilayah Kerja Labuhan Haji - Wilayah Kerja Labuhan Lalar - Wilayah Kerja Alas - Wilayah Kerja Tg. Luar	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
70.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sape	Bima	Nusa Tenggara Barat
71.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calabahi - Wilayah Kerja Kempo - Wilayah Kerja Dompu/Cempi	Dompu	Nusa Tenggara Barat
72.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Benete	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
73.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang/Tanjung - Wilayah Kerja Senggigi	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
74.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka - Wilayah Kerja Waiwerang - Wilayah Kerja Lewoleba - Wilayah Kerja Balawuring - Wilayah Kerja Mananga - Wilayah Kerja Wuring	Flores Timur	Nusa Tenggara Timur
75.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo	Manggarai	Nusa Tenggara Timur
76.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Waikelo - Wilayah Kerja Rua - Wilayah Kerja Teluk Gurita	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
77.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Atapupu - Wilayah Kerja Wini	Belu	Nusa Tenggara Timur
78.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Baranusa - Wilayah Kerja Tabir - Wilayah Kerja Kolana - Wilayah Kerja Maritang	Alor	Nusa Tenggara Timur
79.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Baa - Wilayah Kerja Batu Tua - Wilayah Kerja Naik Liu - Wilayah Kerja Ndao - Wilayah Kerja Oelapa - Wilayah Kerja P. Baru	Kupang	Nusa Tenggara Timur
80.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Seba - Wilayah Kerja Biyu - Wilayah Kerja Raijua	Kupang	Nusa Tenggara Timur

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
81.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Marapokot - Wilayah Kerja Maurole	Ngada	Nusa Tenggara Timur
82.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Bajo - Wilayah Kerja Aimere - Wilayah Kerja Mborong(Mborog) - Wilayah Kerja Nangalele - Wilayah Kerja Paitako	Manggarai	Nusa Tenggara Timur
83.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Paloh/Sakura - Wilayah Kerja Jeruju	Singkawang	Kalimantan Barat
84.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Teluk Melano	Ketapang	Kalimantan Barat
85.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kendawangan - Wilayah Kerja Air Hitam	Singkawang	Kalimantan Barat
86.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kereng Bengkirai	Palangkaraya	Kalimantan Tengah
87.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sei Danau	Kotabaru	Kalimantan Selatan
88.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Batu	Kotabaru	Kalimantan Selatan
89.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sebuku	Tanah Laut	Kalimantan Selatan

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
90.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kintap	Tanah Laut	Kalimantan Selatan
91.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sangkulirang	Berau	Kalimantan Timur
92.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Selor	Bulungan	Kalimantan Timur
93.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Nyamuk	Kutai	Kalimantan Timur
94.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Redep - Wilayah Kerja Tali Sayan	Berau	Kalimantan Timur
95.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pulau Bunyu	Kutai Timur	Kalimantan Timur
96.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Semboja/ Sebulu	Kutai	Kalimantan Timur
97.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Lirung - Wilayah Kerja Beo - Wilayah Kerja Esang - Wilayah Kerja Mangasang - Wilayah Kerja Marompit - Wilayah Kerja Marore - Wilayah Kerja Malanguane - Wilayah Kerja Raimis	Sangihe Talaud	Sulawesi Utara

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
98.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Ulu Siau - Wilayah Kerja Pehe	Sangihe Talaud	Sulawesi Utara
99.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Belang - Wilayah Kerja Amurang - Wilayah Kerja Tumbak - Wilayah Kerja Air Tembaga	Minahasa	Sulawesi Utara
100.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kotabunan - Wilayah Kerja Malibuga	Bolaang Mangondow	Sulawesi Utara
101	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Uki - Wilayah Kerja Inoponto	Bolaang Mangondow	Sulawesi Utara
102.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Likupang	Minahasa	Sulawesi Utara
103.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kwandang - Wilayah Kerja Gentuna - Wilayah Kerja Toligunda - Wilayah Kerja Baroko	Limboto	Gorontalo
104.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tilamuta - Wilayah Kerja Marisa - Wilayah Kerja Bumbulan/ Tambulo - Wilayah Kerja Popayanto	Limboto	Gorontalo
105.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Anggrek	Limboto	Gorontalo

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
106.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Leok - Wilayah Kerja Kumaligon - Wilayah Kerja Palele - Wilayah Kerja Lokididi	Buol	Sulawesi Tengah
107.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Ogoamas - Wilayah Kerja Sabang - Wilayah Kerja Ogotua	Toli-toli	Sulawesi Tengah
108.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Parigi	Donggala	Sulawesi Tengah
109.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Moutong	Donggala	Sulawesi Tengah
110.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Ampana - Wilayah Kerja Wahai	Poso	Sulawesi Tengah
111.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bunta	Banggai	Sulawesi Tengah
112.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pagimana	Pagimana	Sulawesi Tengah
113.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai	Luwuk	Sulawesi Tengah
114.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolonedale - Wilayah Kerja Wosu	Poso	Sulawesi Tengah

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
115.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk	Luwuk	Sulawesi Tengah
116.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wani	Donggala	Sulawesi Tengah
117.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju - Wilayah Kerja Tapalang	Mamuju	Sulawesi Selatan
118.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene - Wilayah Kerja Mulunda - Wilayah Kerja Pamboang - Wilayah Kerja Palipi - Wilayah Kerja Sendana - Wilayah Kerja Campalagiang - Wilayah Kerja Tinambung	Majene	Sulawesi Selatan
119.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Malili	Luwu	Sulawesi Selatan
120.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali	Polewalimamasa	Sulawesi Selatan
121.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Awarange/Barru	Barru	Sulawesi Selatan
122.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulukumba - Wilayah Kerja Bitu/Tn. Beru	Bulukumba	Sulawesi Selatan
123.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jeneponto	Jeneponto	Sulawesi Selatan

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
124.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Selayar - Wilayah Kerja Paminatata	Selayar	Sulawesi Selatan
125.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jampea - Wilayah Kerja Bonerate	Selayar	Sulawesi Selatan
126.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinjai - Wilayah Kerja Burung Leo - Wilayah Kerja Tuju-Tuju - Wilayah Kerja Kambuno	Sinjai	Sulawesi Selatan
127.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Belang-Belang - Wilayah Kerja Budong-Budong - Wilayah Kerja Kaluku - Wilayah Kerja Pasang Kayu - Wilayah Kerja Sampaga	Mamuju	Sulawesi Selatan
128.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bajoe - Wilayah Kerja Barerebo - Wilayah Kerja Cendrana - Wilayah Kerja Kading	Bone	Sulawesi Selatan
129.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Siwa - Wilayah Kerja Wajo	Waji	Sulawesi Selatan
130.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pattirobajo	Bone	Sulawesi Selatan
131.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Biringkasi	Pangkep	Sulawesi Selatan

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	- Wilayah Kerja Danggai - Wilayah Kerja Wartuo		
132.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Raha - Wilayah Kerja Tampo - Wilayah Kerja Malingano - Wilayah Kerja Ereke	Muna	Sulawesi Tenggara
133.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolaka - Wilayah Kerja Lasusua - Wilayah Kerja Malumbo - Wilayah Kerja Oloho - Wilayah Kerja Watunohu - Wilayah Kerja Rante Angin - Wilayah Kerja Wollo	Kolaka	Sulawesi Tenggara
134.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara - Wilayah Kerja Lapuko - Wilayah Kerja Torobuku - Wilayah Kerja Malewe - Wilayah Kerja Muse	Kendari	Sulawesi Tenggara
135.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Amahai - Wilayah Kerja Tehuru	Maluku Tengah	Maluku
136.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Geser - Wilayah Kerja Katalako/ Ondor	Maluku Tengah	Maluku
137.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laiwui - Wilayah Kerja Wayaloar - Wilayah Kerja Kawasi - Wilayah Kerja Sum - Wilayah Kerja Madopolo	Halmahera Obi Obi Obi Obi Bisa	Maluku Utara

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	- Wilayah Kerja Jiko Tamo - Wilayah Kerja Loleo - Wilayah Kerja Tobalai	Obi Latu Gamumu Tobalai	
138.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Leksula - Wilayah Kerja Air Buaya - Wilayah Kerja Namrole	Maluku Tengah	Maluku
139.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonreli - Wilayah Kerja Hilaromang - Wilayah Kerja Kaiwat/Moa - Wilayah Kerja Lakor - Wilayah Kerja Waluru	Maluku Tengah	Maluku
140.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wahai - Wilayah Kerja Kabisonta - Wilayah Kerja Taniwel	Maluku Tengah	Maluku
141.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Waisarisa - Wilayah Kerja Kairatu - Wilayah Kerja Piru - Wilayah Kerja Wailey - Wilayah Kerja Luhu - Wilayah Kerja Loki - Wilayah Kerja Waisala - Wilayah Kerja Pelita Jaya - Wilayah Kerja Pulau Osi - Wilayah Kerja Kawah - Wilayah Kerja Manipa - Wilayah Kerja Buano - Wilayah Kerja Hatunuru/ Rumalata	Maluku Tengah	Maluku
142.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Soasio - Wilayah Kerja Gita/Payahe - Wilayah Kerja Saketa	Tidore	Maluku Utara

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Guruaping - Wilayah Kerja P. Kayao - Wilayah Kerja Rum - Wilayah Kerja Maitara - Wilayah Kerja Moti - Wilayah Kerja Mare 	<p style="text-align: center;">Tidore Maitara Moti Mare</p>	
143.	<p>Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jailolo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Matui - Wilayah Kerja Kedi - Wilayah Kerja Ibu - Wilayah Kerja Bataka - Wilayah Kerja Susupu - Wilayah Kerja Sidangoli - Wilayah Kerja Obane Igo 	<p style="text-align: center;">Halmahera</p> <p style="text-align: center;">Halmahera Halmahera Halmahera Halmahera Halmahera Halmahera Halmahera</p>	Maluku Utara
144.	<p>Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Daruba</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Bare-bare - Wilayah Kerja Wayabula - Wilayah Kerja Tanjung Sopi - Wilayah Kerja Posi-posi 	<p style="text-align: center;">Morotai</p> <p style="text-align: center;">Morotai Morotai Morotai Rau</p>	Maluku Utara
145.	<p>Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Buli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Patani - Wilayah Kerja Mayamli - Wilayah Kerja Miyaf - Wilayah Kerja Dorosagu - Wilayah Kerja Akelamo - Wilayah Kerja Bilolo - Wilayah Kerja Subaim 	<p style="text-align: center;">Halmahera</p> <p style="text-align: center;">Halmahera Halmahera Halmahera Halmahera Halmahera Halmahera</p>	Maluku Utara
146.	<p>Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pulau Gebe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Weda - Wilayah Kerja Yoi 	<p style="text-align: center;">Halmahera</p> <p style="text-align: center;">Yoi</p>	Maluku Utara
147.	<p>Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui</p>	<p style="text-align: center;">Yapen Waropen</p>	Papua

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Ambai - Wilayah Kerja Ansus - Wilayah Kerja Apower - Wilayah Kerja Kaipuri - Wilayah Kerja Poom - Wilayah Kerja Wainapi - Wilayah Kerja Samberbaba 		
148.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Waren - Wilayah Kerja Warapasi	Yapen Waropen	Papua
149.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nabire / Teluk Kimi - Wilayah Kerja Kuatisore - Wilayah Kerja Napan - Wilayah Kerja Nusa - Wilayah Kerja Wanggur - Wilayah Kerja Wapoga	Paniai	Papua
150.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana - Wilayah Kerja Afona - Wilayah Kerja Adijaya - Wilayah Kerja Karas - Wilayah Kerja Lobo - Wilayah Kerja Nofa - Wilayah Kerja P.Adi - Wilayah Kerja Sinini - Wilayah Kerja Etna - Wilayah Kerja Selesai - Wilayah Kerja Susunu	Fak-fak	Papua
151.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sarmi - Wilayah Kerja Armopa - Wilayah Kerja Bagusa - Wilayah Kerja Betaf - Wilayah Kerja Kasonaweja - Wilayah Kerja Matabor - Wilayah Kerja Takar - Wilayah Kerja Teba	Jayapura	Papua

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Wakde - Wilayah Kerja Yamna - Wilayah Kerja Demta 		
152.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Korido <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Bosnik - Wilayah Kerja Jenggerbun - Wilayah Kerja Kameri/Numford - Wilayah Kerja Karem - Wilayah Kerja Miosbipondi - Wilayah Kerja Wardo 	Biak Numfor	Papua Barat
153.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Oransbari <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Ransiki 	Manokwari	Papua Barat
154.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wasior <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Windesi 	Manokwari	Papua Barat
155.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Taminibuan (Teminabuan) <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Kasim - Wilayah Kerja Salawati - Wilayah Kerja Kais - Wilayah Kerja Warongge - Wilayah Kerja Inanwatan - Wilayah Kerja Kondo - Wilayah Kerja Plamano - Wilayah Kerja Segeet - Wilayah Kerja Sele 	Sorong	Papua Barat
156.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Saunek <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Mayalibit - Wilayah Kerja Urbinasopen - Wilayah Kerja Gam - Wilayah Kerja Kabare 	Sorong	Papua Barat

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Sailolo - Wilayah Kerja Saukorem - Wilayah Kerja Sausapor 		
157.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kokas <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Bomberai - Wilayah Kerja Sagan 	Mimika	Papua Barat
158.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomako <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Hiripao - Wilayah Kerja Kokopao - Wilayah Kerja Huta 	Fak-fak	Papua Barat
159.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Agats <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Atsy - Wilayah Kerja Jipawer - Wilayah Kerja Kamur - Wilayah Kerja Kepi/Agats - Wilayah Kerja Pirimapon - Wilayah Kerja Sawaerina - Wilayah Kerja Yarnas - Wilayah Kerja Yaosakar 	Merauke	Papua Barat
160.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bade <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Anggamburam - Wilayah Kerja Arambu - Wilayah Kerja Bayun - Wilayah Kerja Kaptel - Wilayah Kerja Biau - Wilayah Kerja Bulaka - Wilayah Kerja Bupul - Wilayah Kerja Cabang Tiga - Wilayah Kerja Eci - Wilayah Kerja Gententeri - Wilayah Kerja Kepi/Bade - Wilayah Kerja Kimaan - Wilayah Kerja Mandiptanah - Wilayah Kerja Moor 	Merauke	Papua Barat

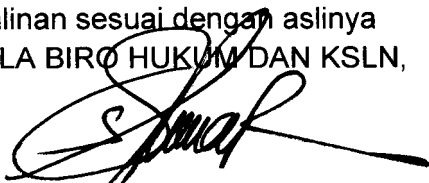
NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Muting - Wilayah Kerja Okaba - Wilayah Kerja Semanggi - Wilayah Kerja Tn. Merah - Wilayah Kerja Tn. Miring 		
161.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kerja Arandai - Wilayah Kerja Babo 	Manokwari	Papua Barat

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630220 198903 1 001